

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. PEMERINTAH : **PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**
2. VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat
3. MISI :
 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Utama/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
I. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	Laporan	Diskominfo
II. Mewujudkan masyarakat taat hukum	2. Persentase penurunan pelanggaran perda	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda (n)} - \sum \text{Pelanggaran (n-1)}}{\sum \text{Pelanggaran th (n-1)}} \times 100\%$	Laporan	SATPOL PP
III. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	3. Indeks Reformasi Birokrasi	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan	Bagian Organisasi
IV. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	4. Laju pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDRB (t+1)} - \text{PDRB (t)}}{\text{PDRB (t)}} \times 100\%$	Laporan	Bappeko
V. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	5. Indeks Infrastruktur	(Kondisi Jalan Mantab x 30%) + (Indeks Infrastruktur Dasar Pemukiman x 30%) + (IKLHD x 20%) + (Indeks Layanan Transportasi x 20%)	Laporan	Bappeko
VI. Meningkatkan Kesalehan Sosial	6. Indeks Kesalehan Sosial	Indeks Kesalehan Sosial	Survei	Diskominfo

VII. Meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender	7. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p> <i>P_i</i> : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-<i>i</i> <i>Q_i</i> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-<i>i</i> <i>G</i> < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ <i>G</i> ≤ 0,5 = ketimpangan sedang <i>G</i> > 0,5 = ketimpangan tinggi </p>	Laporan	Bappeko
	8. Indeks Pembangunan Gender	<p>IPG adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain : dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. Dimana IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan ketimpangan gender.</p> $IPG = \frac{IPM_{perempuan}}{IPM_{laki-laki}}$	Laporan	DP3AKB

VII. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	9. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	<p>KFD kabupaten/kota-i = pendapatan - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu]</p> <p>Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok; b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; c. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi; d. Dana Alokasi Khusus Fisik; e. Dana Alokasi Khusus Nonfisik; f. Dana Otonomi Khusus; dan g. Dana Desa. <p>Kategori Kapasitas Fiskal Daerah :</p> <p>IKFD < 0,548 = sangat rendah 0,548 ~ IKFD < 0,770 = rendah 0,770~IKFD< 1,137 = sedang 1,137 ~ IKFD < 2,021 = tinggi IKFD > 2,021 = sangat tinggi</p>	Laporan	BPPKA
---	-----------------------------------	--	---------	-------